

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BARITO TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR TEMENGGOENG DJAJA KARTI
KECAMATAN DUSUN TIMUR KABUPATEN BARITO TIMUR**

Siti Paulina¹, Nurlina²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: nanafaulina8@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :25-09-2025

Revised :02-10-2025

Accepted :13-10-2025

Keywords:

Implementation, Regional
Regulations, Barito Timur

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The background of this study is the lack of awareness of traders and the public regarding waste management, the inadequate ability of cleaning staff in handling waste management, the lack of trash bins, and the unavailability of segregated trash bins in the market area. The purpose of this study is to determine the implementation of East Barito Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Waste Management at Temenggoeng Djaja Karti Market, Dusun Timur District, and to identify the factors that influence it. This study uses a qualitative approach with qualitative descriptive. Data collection methods are carried out by interviews, observation, and documentation. Data sources are obtained by purposive sampling technique, which involves 14 respondents. The research results indicate that there are still shortcomings in information dissemination, clarity of communication, and consistency. The number of sanitation workers is sufficient, and information and authority are optimal, but the condition of waste management infrastructure remains inadequate. The placement of sanitation workers and the provision of incentives are considered optimal, and SOP are considered quite optimal. The division of tasks, or fragmentation of responsibilities, between parties has also been implemented according to their respective duties. Supporting factors

for implementation include salaries for officers and dissemination of information through public appeals. Inhibiting factors include low levels of market cleanliness compliance and budget constraints. To ensure optimal implementation of this regulation, it is recommended that the Environmental Agency and the Tamiang Layang Market Technical Implementation Unit (UPTD) work together to educate traders and the public about the importance of waste management, including recycling, in the market.

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini kurangnya kesadaran pedagang dan masyarakat terhadap pengelolaan sampah, kemampuan petugas kebersihan yang belum memadai dalam menangani pengelolaan sampah, kekurangan tempat sampah, serta belum tersedianya tempat sampah terpilah di area pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Temenggoeng Djaja Karti Kecamatan Dusun Timur serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dengan teknik purposive sampling, yang melibatkan sebanyak 14 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya kekurangan dalam penyebaran informasi, kejelasan komunikasi, dan konsistensi komunikasi. Jumlah petugas kebersihan sudah mencukupi, informasi dan kewenangan sudah cukup optimal, namun kondisi sarana prasarana pengelolaan sampah masih belum memadai. Penempatan petugas kebersihan, pemberian insentif tergolong optimal, dan SOP tergolong cukup optimal. Pembagian tugas atau fragmentasi tanggung jawab antar pihak juga telah dilaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing. Faktor yang mendukung implementasi adalah pemberian gaji kepada petugas dan penyebaran informasi melalui himbauan publik. Faktor penghambatnya meliputi Kurangnya Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebersihan di Pasar dan keterbatasan anggaran. Agar implementasi peraturan ini dapat berjalan lebih optimal, disarankan agar Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD Pasar Tamiang Layang bersama-sama melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah, termasuk pendaur ulangan sampah di pasar.

PENDAHULUAN

Sampah adalah sisa dari aktivitas harian manusia maupun proses alam yang berbentuk padat, yang terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis lainnya, baik yang dapat terurai maupun yang tidak dapat terurai. Sampah menjadi salah satu sumber permasalahan utama dalam masyarakat modern. Ketidakteraturan dalam pengelolaan sampah menyebabkan dampak serius, mulai dari pencemaran lingkungan hingga bencana alam seperti banjir. Banjir yang kerap terjadi di berbagai wilayah sering disebabkan oleh saluran air yang tersumbat sampah, akibat rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan, seperti di jalan, selokan, maupun sungai. Kondisi ini menunjukkan masih minimnya edukasi dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Padahal, beberapa jenis sampah sebenarnya bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Sayangnya, sebagian besar masyarakat belum terbiasa melakukan pemilahan sampah antara yang organik dan anorganik.

Permasalahan sampah juga berdampak pada pencemaran udara akibat bau menyengat dari timbunan sampah, pencemaran air akibat limbah yang meresap ke tanah dan sumber air, serta menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit. Selain itu, sampah yang tidak dikelola dengan metode dan teknik ramah lingkungan dapat merusak keseimbangan ekosistem di permukiman, persawahan, hutan, hingga sungai. Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah perlu terus mengencangkan edukasi dan penerapan regulasi yang tegas, sementara masyarakat harus meningkatkan kesadaran untuk memilah, mengelola, dan membuang sampah dengan cara yang bertanggung jawab.

Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan peningkatan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang dihasilkan. Sampah telah menjadi masalah nasional yang memerlukan pendekatan pengelolaan secara menyeluruh dan terpadu dari hulu ke hilir. Diperlukan kepastian hukum, kejelasan pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien.

Seiring meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, volume sampah yang dihasilkan juga meningkat khususnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis lainnya. Karena tingginya kepadatan penduduk dan kurangnya pengelolaan sampah yang terorganisir, sampah menjadi menumpuk dan merusak lingkungan. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan, mengurangi pencemaran akibat sampah, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat. Peraturan ini juga mendorong partisipasi aktif dari

masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memotivasi keterlibatan dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, diharapkan implementasinya berjalan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai, yaitu mengurangi pembuangan sampah sembarangan dan mengatasi pencemaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Temenggoeng Djaja Karti, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur. Pasar Temenggoeng Djaja Karti, yang biasa disebut Pasar Tamiang Layang, merupakan pasar semi modern (multiyears) yang berlokasi di Jalan A. Yani, Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pasar ini memiliki 506 pedagang, 26 los terbuka, dan 32 kios. Fasilitas pasar lainnya meliputi satu kantor dan dua unit MCK. Pasar ini menyediakan berbagai komoditas seperti daging sapi, daging ayam ras, ikan nila, telur ayam ras, beras lokal, mie telur, tepung terigu kemasan, sabun mandi isi ulang, minyak goreng kemasan, dan beras kemasan. Pasar ini berperan penting sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial bagi masyarakat Tamiang Layang dan sekitarnya, memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menjadi tempat interaksi antarwarga.

Pasar Temenggoeng Djaja Karti memiliki Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang terkadang juga digunakan oleh beberapa desa di Kecamatan Dusun Timur. Seluruh sampah yang dihasilkan selama pasar beroperasi dibuang ke TPS tersebut. Namun, pengelolaan sampah di pasar ini masih kurang optimal, karena masih ada pedagang yang membuang sampah sembarangan atau meninggalkannya begitu saja. Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa permasalahan, yaitu: Kurangnya kesadaran pedagang dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang benar, di mana pedagang masih sering meninggalkan sampah atau membuangnya sembarangan. Kurangnya kemampuan petugas kebersihan dalam menangani pengelolaan sampah di Pasar Temenggoeng Djaja Karti. Minimnya tempat sampah dan belum tersedia tempat sampah terpilah di area pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Temenggoeng Djaja Karti serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Penelitian terdahulu: Eka Yanti dari Program Studi Administrasi Publik STIA Amuntai (2022) melakukan penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Kelua)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tabalong (Pasar Kelua) belum berjalan efektif karena beberapa kekurangan. Faktor penghambat meliputi kurangnya sarana dan prasarana, jumlah petugas kebersihan yang tidak mencukupi, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Muhammad Rahman, juga dari STIA Amuntai (2022), melakukan penelitian berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Haruyan, Kecamatan Haruyan". Hasil penelitian

menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut masih belum optimal. Faktor pendukung mencakup tenaga kerja, kewenangan, pengaturan birokrasi, insentif, SOP, dan fragmentasi. Sementara faktor penghambat meliputi komunikasi yang kurang efektif, kurangnya kejelasan dan konsistensi, informasi yang belum memadai, fasilitas yang belum mencukupi, serta persepsi negatif dari petugas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menekankan pada analisis data secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini mengandalkan penyajian deskriptif dalam bentuk kata dan kalimat yang disusun secara sistematis mulai dari proses pengumpulan data, interpretasi, hingga penarikan kesimpulan. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan realitas sosial berdasarkan sudut pandang subjek penelitian. Dalam penelitian ini, ketersediaan data dan sumber data merupakan aspek yang sangat penting. Menurut Bungin dalam Sapto Haryoko dkk. (2020:119), data adalah informasi dan fakta yang berkaitan dengan objek penelitian. Data dibagi menjadi dua jenis: data primer, yang diperoleh langsung dari lapangan, dan data sekunder, yang berasal dari dokumen, arsip, atau sumber pendukung lainnya. Terkait dengan sumber data, menurut Kaelan dalam Sapto Haryoko dkk. (2020:109-110), sumber data dapat berupa sampel, informan, partisipan, rekan, guru, atau siapa pun yang memberikan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Observasi kualitatif adalah teknik pengamatan (observasi) yang dilakukan oleh peneliti dalam setting alamiah dengan tujuan untuk mengeksplorasi atau menggali dan membangkitkan suatu makna dari suatu fenomena yang ada dalam diri partisipan atau subjek dalam penelitian kualitatif, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek permasalahan, Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan responden penelitian secara langsung untuk memperoleh data, dan data dokumentasi yaitu dengan menggunakan catatan-catatan, foto, rekaman suara atau rekaman video yang ada dalam lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian.. Ketiga metode ini saling melengkapi untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penelitian ini melibatkan empat belas informan yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menerapkan model implementasi kebijakan George Edwards III, sebagaimana dijelaskan dalam Reno Affrian (2023:38-40), yang mencakup empat komponen utama dalam pelaksanaan kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip dalam Nursapia Harahap (2020:41-42), yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan

data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokannya sesuai dengan masalah yang diteliti, penyajian data dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis, dan penarikan kesimpulan pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual. Untuk menjamin kredibilitas data, digunakan berbagai teknik, seperti perpanjangan waktu pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, penggunaan bahan referensi, analisis kasus negatif, dan pemeriksaan oleh anggota (member check).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Temenggoeng Djaja Karti Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur

Sesuai dengan teori yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Temenggoeng Djaja Karti, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, digunakan model implementasi kebijakan dari George Edwards III sebagaimana dijelaskan dalam Reno Affrian (2023:38–40) sebagai alat analisis untuk mengukur sejauh mana peraturan tersebut telah diterapkan secara efektif. Model ini menekankan empat aspek utama dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.

Aspek komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi disampaikan kepada pelaksana dan masyarakat secara jelas dan konsisten. Sumber daya mencakup ketersediaan tenaga kerja, anggaran, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi mengacu pada sikap dan komitmen para pelaksana terhadap keberhasilan implementasi, sedangkan struktur birokrasi melihat bagaimana mekanisme, SOP, dan koordinasi antar lembaga berjalan dalam mendukung kebijakan.

Keempat aspek ini sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan kebijakan telah berjalan dengan baik atau masih menghadapi hambatan. Dengan demikian, model Edwards III dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap efektivitas implementasi serta membantu merumuskan strategi perbaikan di masa mendatang.

1. Komunikasi Kebijakan

Komunikasi kebijakan merupakan proses penting dalam implementasi kebijakan publik yang mencakup penyampaian informasi, instruksi, dan arahan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementor*). Komunikasi ini berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga setiap pihak yang terlibat memahami maksud, tujuan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kejelasan, konsistensi, serta

kelengkapan informasi yang disampaikan sangat menentukan keberhasilan proses implementasi. Jika komunikasi tidak berjalan efektif, maka akan terjadi kesalahpahaman, multitafsir, bahkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem komunikasi yang terbuka, dua arah, serta disertai dengan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dalam konteks pengelolaan sampah, komunikasi kebijakan harus dapat menjelaskan peran, tanggung jawab, dan prosedur yang harus diikuti oleh pelaksana agar kebijakan dapat diterapkan secara optimal di lapangan.

a. Penyampaian Informasi (*Transmission*)

Dari hasil wawancara, observasi, data dokumentasi di Pasar Temenggoeng Djaja Karti dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi kurang optimal dilakukan oleh Dinas atau pemerintah terkait pengelolaan sampah. Yang mana arahan hanya berupa plang larangan jangan membuang sampah sembarangan tetapi untuk sosialisasi masih belum ada dari dinas terkait untuk penyampaian komunikasi tentang pengelolaan sampah terkhusus di Pasar Temenggoeng Djaja Karti. Masih banyak pedagang dan masyarakat yang mengabaikan kebersihan, seperti membuang sampah sembarangan kemudian masih ada beberapa meninggalkan sampah dagangannya dan kadang beberapa perilaku pedagang yang menumpuk sampah yang lalai terhadap kebersihan.

b. Kejelasan (*Clarity*)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi di Pasar Temenggoeng Djaja Karti dapat disimpulkan bahwa kejelasan komunikasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah kurang optimal, karena banyaknya pedagang dan masyarakat yang belum paham mengenai pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan daerah dan tidak adanya kejelasan komunikasi atau arahan dari Pemerintah atau dinas mengenai pengelolaan sampah secara mendalam kepada masyarakat. Banyak sampah yang masih terbuang secara sembarangan dan tidak tertata dengan baik disebabkan karena tidak adanya kejelasan komunikasi atau arahan dari Pemerintah mengenai pengelolaan sampah secara mendalam kepada masyarakat. Masyarakat juga tidak melakukan upaya pemilahan sampah terlebih dahulu sebelum dibuang dan tidak melaksanakan upaya pemilahan 3R dalam pengelolaan sampah.

c. Konsistensi (*Consistency*)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi di Pasar Temenggoeng Djaja Karti, dapat disimpulkan bahwa konsistensi pelaksanaan di pasar tersebut masih kurang optimal. Pemerintah belum sepenuhnya efektif dan konsisten dalam melaksanakan atau menyampaikan komunikasi kepada masyarakat, dan banyak warga yang masih belum mengetahui ketentuan yang berkaitan dengan peraturan pengelolaan sampah maupun peraturan daerah itu sendiri.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun ketentuan atau aturan telah disusun secara jelas dan konsisten, pelaksanaan kebijakan tidak akan efektif tanpa dukungan sumber daya yang memadai, seperti anggaran, tenaga kerja, peralatan, serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan.

a. Manusia (*Staf*)

Dari hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi mengenai manusia (petugas) di Pasar Temenggoeng Djaja Karti dapat disimpulkan bahwa jumlah staf atau petugas kebersihan di Pasar Temenggoeng Djaja Karti cukup memadai, yaitu ada 4 orang petugas kebersihan, namun dari segi pembersihan masih kurang. Jadi dari segi kualitas memang mencukupi namun dari segi kuantitas masih belum terpenuhi.

b. Peralatan (*Facilities*)

Dari hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi mengenai peralatan di Pasar Temenggoeng Djaja Karti dapat disimpulkan bahwa peralatan pengelolaan sampah kurang memadai, khususnya tempat khususnya belum tersedianya tempat sampah terpilah. Tidak adanya tempat pembuangan sampah seperti bak sampah di sekitar pedagang mengakibatkan sampah menumpuk di beberapa titik tertentu dan terlihat merusak pemandangan lingkungan karena sampah yang menumpuk tersebut.

c. Informasi dan wewenang (*Information and authority*)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan data dokumentasi mengenai informasi dan kewenangan di Pasar Temenggoeng Djaja Karti, bahwa pemberian informasi dan wewenang mengenai pengelolaan sampah cukup baik disampaikan dimana penyampaian informasi dan wewenang dari Kepala UPTD pasar Tamiang Layang kepada petugas sudah dilakukan dengan cukup baik dan jelas, baik dari segi tanggung jawab dan tugasnya, dan petugas sudah bekerja sesuai bidang dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pengelolaan sampah lingkup Pasar Temenggoeng Djaja Karti.

3. Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik yang melekat erat pada individu pelaksana kebijakan, yang mencerminkan sikap, komitmen, dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas. Disposisi ini berperan penting dalam menentukan sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Salah satu aspek utama dalam disposisi adalah pengangkatan birokrasi, yaitu proses seleksi dan penempatan aparatur yang kompeten dan profesional dalam struktur organisasi. Selain itu, sistem insentif juga menjadi bagian penting dari disposisi, karena dapat memotivasi pelaksana kebijakan untuk bekerja lebih optimal dan bertanggung jawab dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

a. Pengangkatan Birokrasi (*Staffing the bureaucracy*)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi yang berkaitan dengan pengangkatan birokrasi di Pasar Temenggoeng Djaja Karti, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian proses birokrasi yakni pemilihan atau pengangkatan petugas pengangkut sampah telah dilaksanakan dengan cukup optimal, karena petugas kebersihan di pasar tersebut dipilih atau diangkat dari warga lokal Kecamatan Dusun Timur. Namun, dari segi kemampuan dan kompetensi mereka, masih terdapat kekurangan, sehingga diperlukan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dalam pengelolaan sampah yang benar.

b. Insentif (*incentives*)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan data dokumentasi mengenai insentif di Pasar Temenggoeng Djaja Karti dapat disimpulkan bahwa insentif yang mereka dapat berupa diangkatnya sebagai penghargaan seorang petugas kebersihan dengan pemberian subsidi atau upah ataupun gaji yang mereka dapat setiap bulannya. Karena upaya dinas untuk memotivasi dengan cara memberikan gaji hasil kerja mereka sehingga petugas masih bisa melaksanakan tugas dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Struktur yang jelas dan tertata akan memudahkan koordinasi antar bagian serta mempercepat pengambilan keputusan. Salah satu elemen penting dalam mendukung kinerja organisasi adalah keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP menjadi acuan yang baku bagi setiap pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga tercipta konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya SOP, kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam proses kerja dapat diminimalkan, serta kualitas layanan dapat terjaga.

a. Membuat Standard Operating Procedures (SOP)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai membuat standar operasional prosedur (SOP) di Pasar Temenggoeng Djaja Karti dapat disimpulkan bahwa untuk SOP petugas kebersihan tidak memiliki SOP sehingga petugas kebersihan tidak memiliki pedoman dalam menjalankan tugas mereka dan untuk tugasnya masing-masing khususnya petugas kebersihan pasar sudah ada dan berjalan dengan baik. meskipun masih ada beberapa yang belum sesuai seperti pemilahan jenis sampah dan pengelompokan sampah.

b. Melaksanakan Fragmentasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait pelaksanaan fragmentasi di Pasar Temenggoeng Djaja Karti, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fragmentasi telah berjalan dengan baik. Pemerintah atau

instansi terkait telah melakukan fragmentasi, yaitu pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan sampah, dan proses ini berjalan dengan lancar terutama kepada petugas kebersihan yang telah ditugaskan untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah, khususnya di Pasar Temenggoeng Djaja Karti.

B. Faktor Yang Mempengaruhi

Dalam suatu implementasi kebijakan yang dibentuk dan dijalankan, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung seperti ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta dukungan dari masyarakat akan mempercepat dan mempermudah proses implementasi. Sebaliknya, faktor penghambat seperti kurangnya koordinasi, keterbatasan anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta resistensi dari pihak-pihak tertentu dapat menghambat pencapaian hasil kebijakan secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan penanganan yang tepat terhadap kedua faktor tersebut.

1. Faktor Pendukung

a. Pemberian Gaji Kepada Petugas Kebersihan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait pemberian gaji kepada petugas kebersihan di Pasar Temenggoeng Djaja Karti, dapat disimpulkan bahwa insentif yang mereka terima merupakan bentuk penghargaan atas kinerja mereka. Insentif tersebut diberikan dalam bentuk subsidi, upah, atau gaji bulanan yang rutin dibayarkan. Hal ini merupakan bagian dari upaya Dinas terkait untuk memberikan motivasi kepada para petugas agar tetap semangat dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya penghargaan berupa gaji, petugas kebersihan merasa dihargai dan termotivasi untuk terus menjaga kebersihan pasar secara optimal dan konsisten.

b. Upaya Penyampaian informasi berupa himbauan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai upaya penyampaian informasi berupa himbauan di Pasar Temenggoeng Djaja Karti, dapat disimpulkan bahwa himbauan yang dilakukan bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif seluruh pihak yang terlibat. Himbauan disampaikan melalui kerja sama antara kepala UPTD pasar, petugas kebersihan, pedagang, dan pembeli agar saling mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta rasa tanggung jawab bersama dalam menciptakan pasar yang bersih dan sehat. Penyampaian himbauan secara rutin diharapkan mampu meningkatkan kesadaran individu agar memiliki kepedulian dan komitmen dalam menjaga kebersihan Pasar Temenggoeng Djaja Karti secara berkelanjutan.

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebersihan di Pasar

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan mengenai tingkat kepatuhan terhadap kebersihan di Pasar Temenggoeng Djaja Karti, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran tersebut mencerminkan kurangnya pemahaman, kepedulian, dan tanggung jawab dari pedagang maupun pembeli terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Banyak dari mereka masih membuang sampah sembarangan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Perilaku ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi para pengguna pasar. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi sangat diperlukan guna menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan pasar.

b. Keterbatasan Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan mengenai hambatan anggaran yang terbatas di Pasar Temenggoeng Djaja Karti, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi pengelolaan sampah di area pasar. Minimnya dana yang dialokasikan menyebabkan terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana seperti tempat sampah yang memadai, fasilitas pemilahan sampah, dan armada pengangkut sampah. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada kurangnya program edukasi dan sosialisasi kepada pedagang, pembeli, serta masyarakat sekitar. Akibatnya, kesadaran dan pengetahuan mereka terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik masih rendah, sehingga implementasi kebijakan belum berjalan optimal.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pasar Temenggoeng Djaja Karti Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur kurang optimal dilaksanakan, Hal ini dapat dilihat dari indikator Indikator transmisi (Penyampaian informasi) kurang optimal dilaksanakan oleh Dinas atau pemerintah terkait tentang pengelolaan sampah terkhusus di Pasar Temenggoeng Djaja Karti. Indikator kejelasan komunikasi kurang optimal, karena banyaknya pedagang, pembeli dan masyarakat yang belum paham mengenai pengelolaan sampah. Indikator konsistensi dalam komunikasi juga kurang optimal dilaksanakan. Indikator staf atau petugas yang petugas kebersihan di Pasar Temenggoeng Djaja Karti sudah memadai, yaitu ada 4 orang petugas kebersihan. Indikator Informasi dan wewenang cukup optimal disampaikan, di mana penyampaian informasi dan wewenang dari Kepala UPTD pasar kepada petugas sudah dilakukan dengan cukup baik dan jelas. Indikator fasilitas pengelolaan sampah kurang memadai, khususnya tempat sampah masih kurang dan belum tersedianya fasilitas tempat sampah

terpilah di Pasar Temenggoeng Djaja Karti. Indikator pengangkatan birokrasi/pemilihan atau pengangkatan petugas kebersihan sampah cukup optimal dilaksanakan. Indikator insentif sudah optimal dilakukan. Indikator SOP cukup optimal terkait Fragmentasi atau penyebaran tanggung sudah optimal dilaksanakan. Pemerintah atau Dinas sudah melakukan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pasar Temenggoeng Djaja Karti Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur ada 2 hal yaitu: pertama, faktor pendukung meliputi pemberian gaji kepada petugas kebersihan, upaya penyampaian informasi berupa himbauan. Kemudian yang kedua, faktor penghambat yang meliputi Kurangnya Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebersihan di Pasar dan keterbatasan anggaran. Adapun saran untuk: Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah khususnya di Pasar Temenggoeng Djaja Karti bagaimana pendaur ulangan ataupun bagaimana pemanfaatan sampah dari sampah Pasar. Kepada Kepala UPTD Pasar Tamiang Layang diharapkan dapat berkoordinasi melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk mengupayakan pengelolaan sampah dengan melakukan upaya pemilihan sampah berdasarkan kategori sampah. Kepada petugas kebersihan pasar, agar lebih meningkatkan kinerjanya lagi dalam membersihkan sampah. Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan meningkatkan upaya preventif dan represitif dalam penegakan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah, khususnya melalui sosialisasi yang massif serta penindakan yang tegas namun humanis terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, diharapkan adanya sinergi yang lebih kuat dengan instansi Dinas Lingkungan Hidup Barito Timur dan Kepala Pengelola UPTD Pasar Tamiang Layang saling bekerjasama agar implementasi Peraturan Daerah tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pembinaan pedagang, masyarakat dan budayawan perilaku hidup bersih. Kepada pedagang dan masyarakat sekitar, di Pasar Temenggoeng Djaja Karti, agar ditingkatkan lagi kesadaran diri mengenai pengelolaan sampah, minimal membantu petugas kebersihan dengan cara merapikan sampahnya dan menyediakan tong sampah kecil didekat jualan masing-masing. Kepada Pengunjung Pasar Temenggoeng Djaja Karti untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan ikut terlibat dalam menjaga lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2020. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Anonim. 2024. *Komoditas di Pasar Tumenggung Jayakarta*. (Online). Tersedia : <https://disdagkopukm.baritotimurkab.go.id> (15 Maret 2025).
- Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV Syakir Media Press.
- Abidin, Said Zainal. 2019. *Kebijakan Publik*, Edisi 4. Jakarta Selatan: Salemba Hamanika.
- Affrian, Reno. 2023 *Model-model Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Harahap, Nursapia . 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing.
- Haryoko, Sapto. *Et al.* 2020. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makasar: Badan Penerbit UNM.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Malang: Instrans Publishing.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khairon. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Mahardhan, Ardhana Januar. 2018. *Advokasi Kebijakan Publik*. Ponogoro: Penerbitan & Percetakan Calina Media.
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : ALFABETA.
- Rakhamah. *Et al.* 2024. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori, Metode, dan Praktik*. Bandung: Widina Media Utama.
- Runtuuwu, Prince Charles Heston. 2020. *Kajian Sistem Pengelolaan Sampah*. Malang: Ahlimedia Press.
- Sahir, Syarfrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Septiana, Anis Ribcalia. *Et al.* 2023. *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi, dan Aplikasi*. Sumatra Barat: : PT Global Eksekutif Teknologi.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Winengan. 2019. *Dinamika Rumusan Kebijakan Publik*. Mataram: Sanabil.
- Yudianto, Era Yudistira dan Atika Lusi Tania. 2019. *Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan di Kota Metro*. Metro: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro.